JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 4, 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT (DPG/RESTORASI GAMBUT) DI DESA PULAU DAMAR KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Lutfi Noor Abdillah[1], Irza Setiawan[2], Barkatullah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: ltfinrabdllh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya fenomena masalah yang berupa, pertama, minimnya jumlah sarana pembantu dalam kegiatan perbaikan dan proses pengembangan lahan. Kedua, kurangnya fasilitator desa. Ketiga, masih banyak masyarakat yang belum memahami program. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diambil melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui *purposive sampling* dengan informan sejumlah 12 orang. Setelah data terkumpul, dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan manggunakan bahan referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik. Hal ini dilihat dari: Pertama, aspek transmisi belum baik. Kedua, aspek kejelasan belum baik. Ketiga, aspek konsistensi belum baik. Keempat, aspek staff belum baik. Kelima, aspek fasilitas belum baik. Keenam, aspek informasi belum baik. Ketujuh, aspek kewenangan cukup baik. Kedelapan, aspek pengangkatan birokrat belum baik. Kesembilan, aspek insentif cukup baik. Kesepuluh, aspek Standar Operating Procedure (SOP) cukup baik. Kesebelas, aspek fragmentasi cukup baik. Faktor penghambat implementasi program ini yaitu, pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Ketiga, kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia. Faktor pendukungnya yaitu adanya Standar Operating Procedure (SOP).

Kata Kunci: Implementasi, Program Desa Peduli Gambut

ABSTRACT

This research was motivated by the discovery of the phenomenon of problems in the form of, first, the lack of auxiliary facilities in the repair activities and land development process. Second, the lack of village facilitators. Third, there are still many people who do not understand the program. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Peat Care Village Program (DPG / Peat Restoration) in Pulau Damar Village, Banjang Sub-district and the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data was collected through observation, interviews and documentation. Data sources were taken through purposive sampling with 12 informants. After the data was collected, it was analyzed through data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility tests include extending observation, increasing persistence, triangulation, and using reference materials. The results of this study indicate that the implementation of the Peat Care Village Program (DPG / Peat Restoration) in Pulau Damar Village, Banjang District, Hulu Sungai Utara Regency has not been effective. This can be seen from: First, the transmission aspect is not good. Second, the clarity aspect is not good. Third, the consistency aspect is not good. Fourth, the staff aspect is not good. Fifth, the facilities aspect is not good. Sixth, the information aspect is not good. Seventh, the aspect of authority is quite good. Eighth, the aspect of appointing bureaucrats is not good. Ninth, the incentive aspect is quite good. Tenth, the Standard Operating Procedure (SOP) aspect is quite good. Eleventh, the fragmentation aspect is quite good. Factors inhibiting the implementation of this program are, first, the lack of community understanding of the program. Second, the lack of facilities and infrastructure. Third, the lack of availability of human resources. The supporting factor is the existence of a Standard Operating Procedure (SOP).

Keyword: *Implementation, Peat Care Village Program (DPG / Peat Restoration)*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana berulang yang terus menjadi ancaman serius bagi desa-desa yang berada di dalam maupun sekitar ekosistem gambut. Dampaknya tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat setempat, terutama karena bencana asap yang terjadi secara berkala. Penanganannya selama ini cenderung bersifat reaktif, lebih menitikberatkan pada penanggulangan ketimbang pencegahan. Intervensi biasanya berasal dari pemerintah pusat dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Padahal, desa sebagai unit sosial dan administratif terkecil adalah pihak yang paling dekat dan langsung berhadapan dengan ekosistem gambut serta risiko kebakarannya.

Pemerintah telah mengambil langkah strategis dalam melindungi lahan gambut melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut. Restorasi lahan gambut menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi di kawasan tersebut. Ekosistem gambut memiliki karakteristik yang unik sekaligus rentan. Wilayah ini berfungsi sebagai penyimpan air, habitat berbagai spesies, dan berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim. Meskipun hanya mencakup sekitar 3% dari total daratan di dunia, lahan gambut mampu menyimpan hingga 550 gigaton karbon atau dua kali lipat jumlah karbon yang disimpan oleh seluruh hutan non-gambut.

Namun, ekosistem gambut di Indonesia terus mengalami degradasi, sebagian besar akibat pengeringan dan kebakaran. Dalam dua hingga tiga dekade terakhir, pengelolaan banyak dilakukan secara tidak tepat. Banyak kubah gambut, yang seharusnya dilestarikan karena kemampuannya menyimpan air, justru rusak. Pembuatan kanal yang tidak dirancang dengan baik turut memperparah kondisi dengan mengeringkan lahan, sehingga semakin mudah terbakar. Di wilayah yang telah rusak dan rentan ini, hidup berbagai komunitas masyarakat. Di tujuh provinsi yang menjadi prioritas restorasi gambut, diperkirakan terdapat sekitar 2.945 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan gambut. Dari jumlah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat 731 desa termasuk dalam kategori rawan karhutla. Selain itu, pada area seluas sekitar 2,49 juta hektare yang menjadi sasaran restorasi gambut, terdapat sekitar 1.205 desa dan kelurahan.

BRG memiliki berbagai fungsi strategis dalam menjalankan mandat restorasi gambut, termasuk koordinasi dan penguatan kebijakan, perencanaan serta pengendalian, pemetaan kesatuan hidrologis gambut, hingga penataan ulang lahan gambut yang terbakar. Selain itu, BRG juga bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur pembasahan, edukasi masyarakat, supervisi terhadap infrastruktur di wilayah konsesi, dan lain-lain.

Salah satu program utama BRG dalam mendukung restorasi adalah program DPG. Program ini mencakup fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa, penyelesaian konflik, pengakuan serta legalisasi hak dan akses, penguatan kelembagaan pengelolaan hidrologi dan lahan, kolaborasi antar desa, pemberdayaan ekonomi, pelestarian pengetahuan lokal, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman kebakaran gambut. Agar program ini tepat sasaran, DPG membutuhkan data yang komprehensif tentang desa, baik dalam bentuk spasial (peta) maupun non-spasial (profil sosial, ekonomi, dan potensi lainnya).

Desa Pulau Damar merupakan salah satu desa yang tengah mengimplementasikan Program Desa Peduli Gambut. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih ditemui sejumlah hambatan dan persoalan yang berpotensi memengaruhi tingkat keberhasilan program tersebut. Secara umum, pelaksanaan Program DPG di desa ini belum berjalan secara optimal. Pengembangan kawasan yang menjadi bagian dari program ini juga memiliki variasi pendekatan, tergantung pada potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing desa

Dari obervasi awal, ditemukan fenomena masalah berupa: *pertama*, minimnya jumlah sarana pembantu, pembiayaan, dll dalam kegiatan perbaikan dan proses pengembangan lahan gambut *Kedua*, Kurangnya Fasilitator Desa yang menjadi jembatan antara kebijakan yang ada dengan aspirasi masyarakat setempat. *Ketiga*, Masih banyaknya masyarakat desa yang belum memahami tentang Pentingnya program Desa Peduli Gambut.

Hasil penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Kebijakan BRG (Badan Restorasi Gambut) dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut telah menjadi isu berskala nasional yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BRG dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan analisis menggunakan *Crosstab Query*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kebijakan program dari BRG yang telah diterapkan, dan masyarakat mulai merasakan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dan penelitian terdahulu yang berjudul Evaluasi Program Desa peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Program di desa Pulantani Kecamatan Haur Gading serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 10 orang informan. Teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, serta triangulasi.

Kebijakan publik merupakan serangkaian program yang dirumuskan oleh pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Agar dapat diimplementasikan secara efektif, kebijakan publik tersebut harus selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan resistensi atau kendala dalam pelaksanaannya.

Menurut Ndraha dalam (Sore, n.d.), istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, yang diartikan sebagai keputusan terbaik yang diambil dalam lingkup kewenangan aktor dan lembaga terkait, serta bersifat mengikat secara formal.

Said Zainal Abidin dalam (Anggara, 2014) menyatakan bahwa kebijakan publik tidak memiliki sifat yang spesifik dan terbatas, melainkan bersifat luas dan berada pada tingkat strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berperan sebagai acuan umum bagi kebijakan dan keputusan yang lebih spesifik di tingkat bawah.

James Anderson, sebagaimana dikutip dalam (Agustino, 2016) mendefinisikan kebijakan publik dalam bukunya *Public Policy Making* sebagai rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang dijalankan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menanggapi suatu persoalan yang menjadi perhatian. Konsep ini menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan, bukan hanya pada niat atau rencana yang diusulkan. Inilah yang membedakan kebijakan dari keputusan, di mana keputusan merupakan hasil dari pemilihan antara beberapa alternatif yang tersedia

Aminuddin Bakry dalam (Sasmito et al., 2020) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan serta distribusi sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya manusia demi kepentingan masyarakat atau warga

negara. Pengelolaan aspek-aspek tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan publik. Melalui kebijakan, pengaturan ini menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait, baik sebagai pelaksana maupun penerima kebijakan. Selain itu, kebijakan memiliki legitimasi yang kuat untuk dijalankan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Studi implementasi kebijakan adalah bagian dari kajian kebijakan publik yang fokus pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan mencerminkan tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik dan sering kali melibatkan intervensi berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan mencakup tiga unsur utama: adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, kegiatan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan yang telah dirumuskan.

Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi material tumbuhan yang belum terurai sepenuhnya, sehingga memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Tanah ini umumnya terbentuk di lahan basah dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai peat. Berbagai istilah lokal dan internasional juga digunakan untuk menyebut lahan bergambut, seperti *bog, moor, muskeg, pocosin*, dan *mire*. Istilah "gambut" sendiri berasal dari bahasa Banjar.

Proses pembentukan gambut terjadi ketika pelapukan sisa-sisa tumbuhan terhambat, biasanya karena kondisi lingkungan yang asam atau minim oksigen (anaerob) seperti di lahan rawa. Oleh karena itu, sebagian besar tanah gambut tersusun atas sisa-sisa tumbuhan seperti daun, ranting, kulit kayu, hingga batang pohon besar yang belum terurai sempurna. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan pula bangkai hewan dan serangga yang terawetkan dalam lapisan gambut karena proses dekomposisi yang terhambat.

Tanah gambut atau juga dikenal sebagai tanah Histosol merupakan jenis tanah organik yang memiliki kandungan bahan organik sangat tinggi, mencapai kedalaman hingga 80 cm. Histosol serupa dengan tanah rawa, dan umumnya terdiri dari sisa-sisa tanaman yang telah terdekomposisi sebagian, serta memiliki kemampuan menyimpan air yang tinggi.

Tanah jenis ini biasanya memiliki ketebalan bahan organik lebih dari 40 cm dan sering kali tergenang air dalam jangka waktu yang lama. Namun, jika lahan ini dialiri drainase atau dikeringkan, maka lapisan organiknya akan mengalami penurunan permukaan atau subsidence. Berdasarkan tingkat dekomposisinya, bahan organik dalam tanah dibagi menjadi tiga jenis: fibrik (tingkat dekomposisi rendah, sisa tumbuhan masih terlihat jelas), hemik (setengah terdekomposisi), dan saprik (tingkat dekomposisi lanjut). Tanah gambut umumnya tidak cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan karena tingkat keasamannya yang tinggi.

Program Desa Peduli Gambut (DPG) merupakan inisiatif pembangunan berbasis masyarakat desa yang tinggal di wilayah prioritas restorasi ekosistem gambut. Program ini digagas oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Kemitraan dan sejumlah mitra lainnya. Tujuan utama dari program DPG adalah menyinergikan berbagai upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam satu kesatuan wilayah, yakni Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Pelaksanaan Program DPG mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui tiga bidang utama yang saling berkaitan dan menyesuaikan dengan kondisi serta potensi lokal. Salah satu bidangnya adalah pengembangan kawasan perdesaan pertanian rawa gambut, yang menitikberatkan pada penerapan pertanian berbasis lahan gambut. Program ini diwujudkan melalui budidaya tanaman padi dan berbagai jenis palawija seperti kacang tanah, kacang panjang, jagung, singkong, kangkung, dan ubi. Tanaman-tanaman tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga

berperan dalam menopang perekonomian warga. Di samping itu, masyarakat juga memanfaatkan lahan untuk menanam buah-buahan seperti mangga, pinang, rambutan, dan jambu sebagai sumber pendapatan tambahan, meskipun bukan merupakan penghasilan utama.

Selain sektor pertanian, pengembangan kawasan perdesaan perikanan rawa gambut juga menjadi bagian penting dari program DPG. Kegiatan perikanan dilakukan melalui penangkapan ikan dari sungai dan rawa setempat, seperti ikan sepat, sepat siam, papuyu, dan berbagai jenis ikan lainnya yang kemudian dijual di pasar ikan lokal. Tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan, warga juga melakukan budidaya ikan melalui keramba serta mengolah hasil perikanan menjadi produk seperti ikan asin dan olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, untuk sektor kerajinan berbasis gambut, relisasinya masih belum terlihat secara nyata. Hingga saat ini, belum berkembang kegiatan kerajinan tangan yang memanfaatkan sumber daya khas lahan gambut, seperti purun atau enceng gondok, yang sebenarnya memiliki potensi untuk diolah menjadi produk kerajinan seperti tas, tikar, dan barang kerajinan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program DPG telah berjalan dalam beberapa bidang, masih terdapat ruang pengembangan, khususnya dalam pemanfaatan potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal gambut.

METODE

Pendekatan yang ditetapkan oleh peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diambil melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui purposive sampling dengan informan sejumlah 12 orang. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Hardani (Ahyar et al., 2020) analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, untuk memastikan keabsahan data, sebagaimana dijelaskan dalam (Kuantitatif, 2016), salah satu cara yang digunakan adalah uji kredibilitas. Uji ini dilakukan dengan mencocokkan konsep yang dimiliki peneliti dengan pemahaman informan melalui metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam implementasinya, Program DPG melibatkan berbagai pihak. Program ini dimulai dengan proses identifikasi dan penilaian kondisi gambut di desa-desa yang menjadi target program**.** Selanjutnya, dilakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, seperti penanaman vegetasi asli, pengendalian kebakaran, dan pengelolaan air. Agar lebih jelas mengenai hasil penelitian, maka dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut.

1. Komunikasi

   Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sasaran. Keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari sejauh mana informasi diterima, dipahami, dan direspons secara positif oleh pihak terkait.

   a. Transmisi

      Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana program, pemangku kepentingan, dan masyarakat sasaran. Keberhasilan transmisi dapat dilihat dari seberapa akurat, jelas, dan tepat waktu

informasi diteruskan tanpa mengalami distorsi makna atau kehilangan pesan utama. Informasi yang ditransmisikan dengan baik akan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, mekanisme, dan peran masing-masing dalam program tersebut.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek transmisi belum baik karena informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola dan penyelenggara program tidak dapat dipahami oleh seluruh pihak masyarakat yang merupakan penduduk desa, padahal program tersebut dijalankan atas nama desa, dimana seharusnya masyarakat dapat memahami mekaisnme program yang dijalankan di desa tersebut.

b. Kejelasan

Kejelasan merujuk pada sejauh mana pesan atau informasi yang disampaikan dapat dipahami secara mudah, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda oleh penerima pesan. Dalam konteks pelaksanaan program, kejelasan informasi sangat menentukan pemahaman semua pihak terhadap tujuan, prosedur, target, serta peran dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek kejelasan belum baik karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa masih belum dapat mencapai tujuan program secara keseluruhan, dimana seharusnya masyarakat sebagai subjek utama penghuni desa dapat memahami kejelasan tujuan dan manfaat dari pembuatan program tersebut.

c. Konsistensi

Konsistensi merujuk pada kesinambungan pesan yang disampaikan kepada berbagai pihak, baik secara lisan maupun tertulis, di berbagai tingkat dan tahapan pelaksanaan program. Informasi yang konsisten akan membangun kepercayaan, memperkuat pemahaman, serta mencegah terjadinya kebingungan atau interpretasi yang bertentangan di kalangan pelaksana dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek konsistensi belum baik karena belum ada kesesuaian antara perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan, hasil yang diharapkan, dan tujuan yang seharusnya melibatkan seluruh masyarakat sebagai subjek sasaran program.

2. Sumber daya

Ketidakseimbangan atau kekurangan dalam salah satu aspek sumber daya sering kali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi. Oleh karena itu, penguatan sumber daya menjadi langkah strategis dalam menjamin keberhasilan program yang dijalankan.

a. Staff

Staff tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara pembuat kebijakan dan masyarakat sasaran. Indikator keberhasilan dari aspek ini dapat dilihat dari jumlah staf yang mencukupi, tingkat kualifikasi dan pelatihan yang dimiliki, serta kinerja mereka dalam mendukung pencapaian target program.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek staff belum baik karena dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak untuk menangani berbagai proyek yang dijalankan desa. Sumber Daya Manusia yang tercukupi memungkinkan pembagian beban kerja yang seimbang sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan.

b. Fasilitas

Fasilitas mencakup segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Keberadaan fasilitas yang memadai memungkinkan pelaksana program bekerja secara efisien, mempercepat proses operasional, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Fasilitas dinilai dari kelayakan, ketersediaan, aksesibilitas, dan kemampuannya mendukung aktivitas program secara menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek fasilitas belum baik karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti peralatan, teknologi, dan jalan, untuk memfasilitasi proses operasional program membuat pelaksanaan program menjadi terhambat.

c. Informasi

Informasi mencakup data mengenai kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, capaian program, serta berbagai tantangan yang ditemui. Hal tersebut diukur melalui keterbukaan akses informasi bagi pemangku kepentingan dan kemampuan pelaksana program untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek informasi belum baik karena pemberian arahan tidak bersifat transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk menjalankan program secara terbuka dan bersama-sama. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan tidak memberi pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai sistem pelaksanaan dan tujuan yang diharapkan.

d. Kewenangan

Kewenangan merujuk pada legitimasi dan kapasitas formal yang dimiliki oleh unit pelaksana untuk mengambil keputusan, dan menjalankan tugas dan dalam rangka pelaksanaan program. Kejelasan dan distribusi kewenangan yang tepat memungkinkan proses implementasi berjalan secara tertib dan terkoordinasi.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek kewenangan cukup baik karena Sebagian besar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan fungsi dari masing-masing pihak penyelenggara program.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan para pelaksana maupun penerima program dalam mendukung program secara konsisten. Disposisi mencakup aspek internal seperti motivasi, kepedulian, dan tanggung jawab yang secara langsung memengaruhi

penerapan kebijakan.

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi birokrat yang diangkat untuk melaksanakan suatu program mencerminkan sejauh mana individu tersebut memiliki sikap, komitmen, dan integritas yang selaras dengan tujuan program. Birokrat yang memiliki disposisi positif akan lebih mampu mengarahkan jalannya program sesuai harapan.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek pengangkatan birokrat belum baik karena Fasilitator desa yang memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak pelaksana program belum mencukupi jumlah yang memadai untuk memastikan bahwa setiap tahapan program dapat dipahami oleh masyarakat dan berjalan dengan maksimal.

b. Insentif

Insentif dapat memengaruhi sikap dan motivasi para pelaksana maupun penerima program. Disposisi yang positif seringkali tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk melalui sistem insentif yang mendorong komitmen terhadap pencapaian tujuan program.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek insentif cukup baik karena pemberian upah untuk membayar suatu usaha atas hasil kerja yang dilakukan seorang individu dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerjanya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam mencapai tujuan program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan responsif akan mempermudah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Kejelasan dalam pembagian tugas dan mekanisme komunikasi antar level birokrasi akan mempercepat respon terhadap dinamika di lapangan.

a. *Standar Operating Prosedure* (SOP)

SOP berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur tata cara kerja, alur pelaksanaan, serta tanggung jawab setiap unit atau individu dalam birokrasi. Dengan adanya SOP yang jelas, terstruktur, proses implementasi program menjadi lebih terarah.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek Standar Operating Prosedure (SOP) cukup baik karena dengan adanya Standar Operasional Prosedur yang dibuat, maka pelaksanaan program restorasi gambut dapat dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah terstruktur dengan jelas.

b. Fragmentasi

Fragmentasi mencerminkan sejauh mana koordinasi antar unit birokrasi berjalan secara efektif. Fragmentasi terjadi ketika terdapat pembagian tugas yang tidak terkoordinasi, lemahnya komunikasi, atau tumpang tindih kewenangan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan

Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aspek fragmentasi cukup baik karena hubungan koordinasi antar pihak BRG sebagai penyelenggara program dengan pihak pemerintah desa dan fasilitator sebagai pengelola program dapat terjalin dengan baik sehingga memberikan kepercayaan yang penuh kepada desa tersebut untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan yang telah diberikan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) Di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program

      Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat menjadi faktor yang dapat menghambat Implementasi Program ini, karena program ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat mengenai pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tujuan, manfaat, serta cara-cara pelaksanaan program, mereka cenderung tidak dapat terlibat secara aktif dalam prosesnya. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan miskomunikasi yang bisa menyebabkan kegagalan dalam menerapkan program. Selain itu, seharusnya pihak desa lebih memperhatikan keberadaan masyarakat sebagai penduduk desa untuk dapat menjadi mitra yang berperan dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut melalui program ini.

   b. Kurangnya sarana dan prasarana

      Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana menjadi faktor yang dapat menghambat Implementasi Program ini, karena program ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, peralatan teknis dan sarana pendukung kegiatan masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan terkait pengelolaan lahan gambut. Minimnya alat untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lahan serta keterbatasan sarana akan membuat lokasi tempat proyek dijalankan menjadi sulit untuk dijangkau.

   c. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia

      Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang dapat menghambat Implementasi Program ini, karena individu yang terlibat dalam program berperan penting dalam menyosialisasikan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tanpa kehadiran fasilitator yang cukup dan kompeten, proses pengelolaan program akan berjalan kurang optimal, sehingga tujuan program dalam pemulihan ekosistem gambut akan sulit tercapai. Selain itu, pengelola program yang minim, dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat membuat keterbatasan akan kemampuan kerja dalam pelaksanaan program.

2. Faktor pendukung
   a. Adanya Standar Operating Procedure (SOP)

      Berdasarkan wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa adanya Standar Operating Procedure (SOP) menjadi faktor yang dapat mendukung Implementasi Program ini, karena SOP berfungsi sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan setiap tahapan program. Dengan adanya SOP, maka seluruh pihak yang terlibat, diharapkan dapat menjalankan program melalui acuan yang jelas mengenai prosedur, tanggung

jawab, serta langkah-langkah teknis yang harus dilakukan. SOP digunakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya kesalahan dan tumpang tindih peran dalam pelaksanaan kegiatan. Dibuatnya SOP juga diharapkan mampu mempermudah proses monitoring dan evaluasi karena sasaran dan standar kerja sudah ditetapkan sejak awal.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program belum baik. Penilaian tersebut ditinjau dari: *Pertama*, aspek transmisi belum baik, karena informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola dan penyelenggara program tidak dapat dipahami oleh seluruh pihak masyarakat yang merupakan penduduk desa. *Kedua*, aspek kejelasan belum baik, karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa masih belum dapat mencapai tujuan program secara keseluruhan. *Ketiga*, aspek konsistensi belum baik, karena belum ada kesesuaian antara perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang diharapkan. *Keempat*, aspek staff belum baik, karena dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak untuk menangani berbagai proyek yang dijalankan desa. *Kelima*, aspek fasilitas belum baik, karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi proses operasional program membuat pelaksanaan program menjadi terhambat. *Keenam*, aspek informasi belum baik, karena pemberian arahan tidak bersifat transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk menjalankan program secara terbuka. *Ketujuh*, aspek kewenangan cukup baik, karena Sebagian besar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing pihak penyelenggara. *Kedelapan*, aspek pengangkatan birokrat belum baik, karena Fasilitator desa yang memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak pelaksana program belum mencukupi jumlah yang memadai. *Kesembilan*, aspek insentif cukup baik, karena adanya pemberian upah untuk membayar suatu usaha atas hasil kerja yang dilakukan. *Kesepuluh*, aspek *Standar Operating Procedure* (SOP) cukup baik, karena pelaksanaan program restorasi gambut dapat dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah terstruktur dengan jelas. *Kesebelas*, aspek fragmentasi cukup baik, karena hubungan koordinasi antar pihak BRG sebagai penyelenggara program dengan pihak pemerintah desa dan fasilitator sebagai pengelola program dapat terjalin dengan baik. Faktor penghambatnya berupa Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program, Kurangnya sarana dan prasarana, dan Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia. Faktor pendukungnya berupa adanya *Standar Operating Procedure* (SOP).

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.

Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., Gc, B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif.* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. CV Pustaka Setia.

Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode penelitian kunatitatif kualitatif dan R&D.* Alfabeta, Bandung.

Sasmito, C., Laka, Y. H., & Gunawan, C. I. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. IRDH Book Publisher.

Sore, B. (n.d.). udin & sobirin.(2017). *Kebijakan Publik. Makasar:* Cv Sah Media.